



DI PERSISTAKAAN IPB
TAHUN : 2003

ISBN : 979-8637-

PROSIDING
SEMINAR

TEKANAN PENDUDUK, DEGRADASI LINGKUNGAN DAN KETAHANAN PANGAN

Editor :
Bayu Krisnamurthi
Dwi Astuti Bertha Susila
Agit Kriswantriyono



PUSAT STUDI PEMBANGUNAN
Lembaga Penelitian
Institut Pertanian Bogor
PROYEK KOORDINASI KELEMBAGAAN
KETAHANAN PANGAN
Badan Bimas Ketahanan Pangan
Departemen Pertanian
2002



Kata Pengantar

Berbagai perkembangan yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini telah membuat berbagai permasalahan jangka pendek yang mendesak lebih mendominasi perhatian banyak pihak. Berbagai isu yang menuntut penyelesaian segera seolah datang tidak ada habisnya, dan membuat para pengambil keputusan, baik eksekutif maupun legislatif, seolah tidak lagi memiliki waktu untuk memikirkan hal lainnya. Padahal telah sama disadari bahwa banyak permasalahan jangka pendek sebenarnya hanya merupakan akibat dari permasalahan jangka panjang yang belum tuntas dihadapi atau diantisipasi.

Salah satu permasalahan jangka panjang yang mendesak untuk mendapat perhatian lebih besar adalah masalah pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,49 persen per tahun maka penduduk akan bertambah lebih dari 3 juta jiwa per tahun. Hal ini berarti terjadi pula pertumbuhan tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan, tuntutan peningkatan kesempatan kerja dan tuntutan bagi berbagai kebutuhan hidup lainnya seperti tempat tinggal, fasilitas umum dan sebagainya. Pada gilirannya kedua hal tersebut akan menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Jika proses tersebut terus berlangsung tanpa penanganan yang komprehensif, ketahanan pangan akan terancam dan masalah kemiskinan akan semakin sulit diselesaikan.

Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor (PSP-IPB) dan Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian memandang permasalahan

pertambahan penduduk sebagai masalah yang sangat serius dan mengancam ketahanan pangan nasional, regional dan rumahtangga; sekaligus juga merupakan unsur yang sangat perlu diperhatikan dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Hal tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan Lokakarya Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan. Lokakarya ini diharapkan dapat mengingatkan semua pihak untuk secara serius memikirkan permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berpenduduk besar lainnya, sekaligus dapat menghimpun pemikiran bagi berbagai usaha untuk mengantisipasinya.

PSP-IPB mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan berbagai pihak sehingga lokakarya dapat terselenggara dengan baik, khususnya kepada Menteri Pertanian RI; Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian; para pembicara dan peserta dari INDEF, United Nations Population Fund (UNFPA), Bappenas, PPLH IPB, PPLH ITB, PPSDAL-Unpad, Unbraw, PSLH-UGM, PKA-IPB serta partisipan seminar lainnya. Pemikiran yang telah dikemukakan merupakan sumbangan yang sangat berharga, dan semangat yang diajukan dalam seminar diharapkan dapat bergulir menjadi suatu kegiatan nyata bersama.

Bogor, Mei 2002

Kepala Pusat Studi Pembangunan IPB

Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi

DAFTAR ISI

Isi	Hal.
Latar Belakang	1
Tujuan	6
Rangkuman Hasil dan Rekomendasi	7
Pengantar Lokakarya oleh Kepala Pusat Studi Pembangunan IPB	13
Sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia	17
Makalah Utama	23
Tekanan Penduduk dan Degradasi Sumberdaya Alam di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi (Dr. Bustanul Arifin)	23
Perspektif dan Upaya Pemantapan Ketahanan Pangan Berkelanjutan (Dr. Achmad Suryana)	52
Population and Environmental Change (Dr. Nesim Tumkaya)	76
Permasalahan dan Agenda Pengembangan Ketahanan Pangan (Dr. Deddy M. Masykur Riyadi)	97
Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan Nasional: Investigasi Singkat Mengenai Peranan Kebijakan Pembangunan Nasional (Dr. Parulian Hutagaol dan Ir. Soeryo Adiwibowo, MS)	106
Makalah Penunjang	137
Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan: Kasus Citarum Hulu (Refleksi Persoalan di Tingkat Mikro Bagi Penetapan Kebijakan Makro) (Budhi Gunawan, Parikesit, Oekan S. Abdoellah)	137

Agroforestry: Hidup Berkesinambungan Pada Lahan Sempit (Prof. Wani Hadi Utomo)	176
Signifikansi Reforma Agraria Sebagai Dasar Pembangunan Pertanian Tangguh Menuju Ketahanan Pangan (Dr. Endriatmo Soetarto)	187
Biaya Lingkungan Yang Terabaikan Dalam Kebijakan Ketahanan Pangan (Dr. Harianto dan Ir. Ratna Katharina, MS)	196
Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Dr. Bobi B. Setiawan)	204
Notulen Diskusi	223
Daftar Peserta	256
Liputan Media Massa	259

TEKANAN PENDUDUK, DEGRADASI LINGKUNGAN DAN KETAHANAN PANGAN

"Mencari Solusi Komprehensif Mengurangi Peluang Terjadinya Bencana Yang Berulang"

LATAR BELAKANG

Bencana banjir yang melanda berbagai tempat di Indonesia pada awal tahun 2002 ini telah memberi indikasi kuat perlunya kewaspadaan yang sungguh-sungguh terhadap keseimbangan kondisi sumberdaya alam yang menopang kehidupan Bangsa Indonesia. Banjir besar yang menenggelamkan sebagian kota Jakarta ditengarai berkaitan dengan pemanfaatan lahan didaerah hulu sungai yang kurang sesuai dengan kaidah tataruang, serta pengelolaan wilayah perkotaan yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Namun mengingat sebaran bencana banjir besar yang terjadi tidak hanya pada wilayah dengan tekanan ekonomi yang sangat tinggi, seperti wilayah Jakarta – Bogor – Tangerang - Bekasi (Jabotabek) dan kaitannya dengan wilayah Bogor – Puncak - Cianjur (Bopunjur), tetapi juga didaerah-daerah seperti Pekalongan, Situbondo, Jambi, Kalimantan Tengah, dan daerah lain; maka patut diduga bahwa terdapat masalah yang lebih mendasar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Terlebih jika kemudian dikaitkan pula dengan fakta historis bahwa bencana banjir ini telah berulang dengan periode yang singkat, dengan fenomena bencana yang semakin besar, dan kerugian yang semakin besar pula.

Salah satu masalah penting yang patut diduga menjadi penyebab kondisi yang tidak diinginkan tersebut adalah masalah tekanan penduduk. Indonesia merupakan

salah satu negara yang telah dinilai berhasil mengurangi laju pertumbuhan penduduknya. Namun bahkan dengan pertumbuhan penduduk hanya sekitar 1.5 persen per tahun, tetapi dengan jumlah penduduk mencapai 206 juta jiwa, maka tahun 2002 ini di Indonesia telah terjadi pertumbuhan penduduk hingga 3.09 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk yang sama, jumlah tersebut akan bertambah mencapai sekitar 3.7 juta/tahun pada 2010 pada saat penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 235 juta jiwa.

Tekanan penduduk yang demikian besar akan berakibat pada dua hal pokok. Pertama, kebutuhan akan pangan. Setiap tahun Indonesia akan membutuhkan tambahan pangan setidaknya untuk memenuhi tambahan kebutuhan sekitar 3.5 juta jiwa penduduk tersebut. Jika memperhatikan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat Indonesia saat ini, maka akan terdapat dorongan kebutuhan yang lebih besar bagi pemenuhan pangan non-sereal seperti sayur, buah, produk peternakan, dan perikanan untuk memperoleh status konsumsi gizi yang berimbang. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan setidaknya tambahan 100.000 hektar lahan pertanian untuk memproduksi sereal (padi), dan beberapa puluh ribu hektar lagi untuk memproduksi produk pertanian lain. Akibatnya terjadi tekanan yang semakin berat pada sumberdaya alam, apalagi jika pendaya-gunaan sumberdaya alam tersebut tidak dilakukan dengan bijaksana.

Kedua, kebutuhan peningkatan kesempatan kerja. Pertambahan penduduk dan pertambahan kebutuhan hidup secara langsung akan menumbuhkan kebutuhan akan kesempatan kerja yang semakin besar pula. Urbanisasi dan tumbuhnya

kawasan kumuh diperkotaan merupakan ceminan adanya dorongan yang besar tersebut. Dengan penduduk yang sekitar 45 persen masih terkait dengan kegiatan pertanian, terutama pertanian yang berbasis lahan (*land-base agriculture*), maka tekanan terhadap sumberdaya lahan dan sumberdaya alam pada umumnya akan semakin besar pula.

Masalah kesempatan kerja ini kemudian juga berkait dengan masalah ketersediaan pangan, atau ketahanan pangan pada umumnya. Kasus yang terjadi di beberapa tempat, seperti Lampung dan Bengkulu, dimana sekelompok masyarakat bahkan tidak dapat lagi memberi beras bersubsidi untuk orang miskin; menunjukkan bahwa ketersediaan (*supply*) pangan tidak selalu menjamin tidak terjadinya kerawanan pangan masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat, yang terkait erat dengan produktivitas kesempatan kerja yang tersedia, akan sangat menentukan ketahanan pangan rumah tangga. Kondisi ini juga menegaskan bahwa ketahanan pangan domestik tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuka pasar import untuk pangan. Petani tanaman pangan perlu dijaga agar dapat tetap memperoleh intensif untuk terus berusaha, agar dapat cukup memiliki pendapatan untuk membeli pangan. Bahkan IFPRI dalam laporan yang dikeluarkan September 2001 menunjukkan bahwa indikasi "*food insecurity*" patut diwaspadai. Pada tahun 2020, IFPRI telah memperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan produk sereal hingga sekitar 49 persen dan 92 persen untuk produk daging di negara-negara berkembang, terutama akibat peningkatan tekanan penduduk. Berkaitan dengan hal tersebut, jika tidak dilakukan hal-hal yang signifikan, diperkirakan di Asia

Tenggara, termasuk Indonesia, akan terjadi antara 10 hingga 14 juta anak-anak yang menderita gizi buruk.

Masalah-masalah diatas, kebutuhan akan peningkatan pangan dan kebutuhan kesempatan kerja yang kemudian bermuara pada ancaman terhadap ketahanan pangan akibat peningkatan jumlah penduduk, memiliki keterkaitan yang sangat besar dengan degradasi kondisi lingkungan sumberdaya alam di wilayah pedesaan, termasuk wilayah hulu sungai; disamping juga memberi kontribusi terhadap penurunan kualitas hidup di perkotaan, bahkan sebagai salah satu sumber kemiskinan. Permasalahan-permasalahan mendasar ini pulalah yang kemudian mewujud pada berbagai permasalahan turunan yang timbul kemudian, seperti banjir dan bencana lain. Mengatasi dampak bencana banjir, seperti melakukan pertolongan pertama dan melakukan rehabilitasi berbagai fasilitas, serta melakukan usaha-usaha untuk mengurangi resiko bencana serupa dimasa yang akan datang, seperti pembangunan kanal dan penegakkan hukum; merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan. Namun tanpa penyelesaian menyeluruh dan komprehensif menyangkut beberapa permasalahan diatas, maka ancaman bencana dimasa yang akan datang tetap akan terbuka bahkan semakin membesar.

Pada akhir tahun 1960-an Indonesia telah berhasil menjawab tantangan serupa dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan pengelolaan kelembagaan melalui Bimas yang mampu mendorong terjadinya Revolusi Hijau di Indonesia. Namun demikian, struktur sosisl ekonomi masyarakat saat ini telah sangat berbeda. Beberapa perubahan kontekstual untuk menjawab permasalahan tersebut adalah:

1. Pemasalahan yang kian berat dan mendalam, ditandai dengan kerusakan sumberdaya alam yang telah jauh lebih ekstensif.
2. Jumlah penduduk yang telah meningkat menjadi jauh lebih besar.
3. Pola politik desentralistik dengan penekanan pada otonomi daerah sebagai basis pengambilan keputusan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat.
4. Kemampuan pemerintah yang semakin terbatas, terutama dalam hal pendanaan.
5. Proses demokratisasi dan peranan masyarakat yang lebih dominan, ditandai dengan peran organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat yang kian dominan.
6. Tingkat keterbukaan global dan peran dunia internasional yang semakin meningkat dalam berbagai proses pengambilan keputusan

Kondisi diatas merupakan format baru yang harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karenanya dipandang perlu adanya suatu pembahasan yang komprehensif untuk membahas permasalahan di atas dan solusi komprehensifnya dalam kontek aktual saat ini.

TUJUAN

Sehubungan dengan kondisi yang telah diuraikan diatas, lokakarya “ Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan” secara umum bertujuan membahas urgensi penanganan masalah pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan dan ketahanan pangan, sebagai bentuk usaha bersama mencari solusi komprehensif untuk mengurangi peluang terjadinya bencana yang berulang.

Secara khusus kegiatan tersebut bertujuan:

1. Memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara permasalahan tekanan penduduk, degradasi lingkungan, dan ketahanan pangan; serta dampaknya terhadap bencana yang berulang di Indonesia.
2. Memperoleh perspektif internasional mengenai permasalahan tersebut.
3. Menghimpun pemikiran mengenai solusi komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dalam konteks kondisi dan situasi yang aktual.
4. Menyusun agenda prioritas jangka pendek dan jangka panjang dalam pelestarian lingkungan, pembangunan pertanian, dan pembangunan pedesaan

RANGKUMAN HASIL DAN REKOMENDASI



Selama kurun waktu 1996 – 2000, ketersediaan pangan masih cukup, namun dengan kecenderungan menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan penduduk yang relatif besar, yang tidak sejalan dengan peningkatan produksi pangan yang berjalan lebih lambat. Permasalahan kependudukan Indonesia, selain laju pertumbuhan yang masih tergolong tinggi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, adalah penyebarannya yang tidak merata.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan kompetisi antara pemanfaatan lahan untuk lahan usaha (baik lahan untuk pertanian maupun pembangunan industri), pemukiman penduduk, dan pembangunan prasarana dan sarana publik. Kompetisi pemanfaatan lahan yang tidak terkendali (apalagi dengan mengkonversi lahan pertanian dan daerah resapan air) akan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan khususnya terhadap kualitas lahan pertanian. Apabila degradasi lingkungan tidak segera ditangani, maka akan dapat mengancam kebutuhan pangan umat manusia.

Hal lain yang perlu diwaspadai dari pertumbuhan jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya permintaan bahan pangan baik dalam jumlah, mutu dan keragaman. Peningkatan permintaan bahan pangan yang bermutu dan beragam sangat terkait dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Namun perlu diingat bahwa apabila penurunan kualitas lahan akibat tekanan jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak diantisipasi sedini mungkin, maka dikhawatirkan kemampuan

produksi bahan pangan domestik tidak akan dapat mengikuti peningkatan kebutuhannya. Apabila hal ini terjadi maka pada waktu yang akan datang kebutuhan pangan Indonesia akan semakin tergantung pada impor, yang berarti ketahanan pangan nasional menjadi semakin rentan karena akan semakin tergantung pada kebijakan negara lain.

Ketersediaan pangan pada tingkat nasional yang diukur dari ketersediaan energi (kalori) dan protein, selalu lebih tinggi dari kecukupan yang direkomendasikan. Dari data produksi, cadangan, impor dan ekspor pangan diperoleh tingkat ketersediaan energi untuk dikonsumsi per kapita pada tahun 2000 sebesar 2 992 kilo kalori per hari, yang sebagian besar disediakan oleh padi-padian (67.2 %), diikuti oleh umbi-umbian (8.7 %), biji berminyak (8.0 %) dan minyak dan lemak (6.2 %). Ketersediaan energi ini telah melebihi rekomendasi tingkat kecukupan konsumsi per kapita, yaitu sebesar 2 500 kilo kalori per hari. Ketersediaan protein untuk dikonsumsi per kapita pada tahun 2000 mencapai 80.0 gram per hari. Angka ini lebih tinggi dari rekomendasi kecukupan konsumsi protein per kapita sebesar 55 gram per hari. Walaupun demikian, sebagian besar dari protein ini dihasilkan dari bahan tanaman yaitu 86.9 persen, sedangkan kontribusi protein hewani hanya sebesar 13.1 persen.

Walaupun secara makro ketersediaan pangan telah memenuhi standar kecukupan, namun kecukupan tingkat nasional tersebut tidak tercermin dalam tingkat konsumsi pangan perkapita atau secara mikro. Tingkat konsumsi energi perkapita pada tahun 1999 sekitar 1.849 kilokalori/hari atau hanya 82,2 persen dari tingkat kecukupan

standar kecukupan , juga komposisi kualitas konsumsi gizi masih belum seimbang dan didominasi oleh bahan pangan nabati.

Belum tercapainya kecukupan pangan tingkat individu ini juga ditunjukkan oleh tingginya balita yang mengalami gizi kurang (24,9%) dan gizi buruk (7,7%). Disamping itu, pada tahun 1999 tercatat sekitar 24,2 persen wanita usia subur mengalami kekurangan energi kronis. Apabila kelompok ini sedang mengalami kehamilan atau menyusui, maka dapat diperkirakan anak-anak yang dilahirkannya akan mengalami masalah pertumbuhan dan kesehatan.

Kerawanan pangan mempunyai korelasi positif dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat lagi. Data tahun 1999 menunjukkan proporsi penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,4 persen, yang terdiri dari 17,9 persen mengalami kemiskinan kronis dan 9,5 persen kemiskinan transient (mendadak). Kemiskinan transien ini dapat disebabkan karena kerusuhan sosial-politik, korban bencana alam dan krisis ekonomi yang kuat, atau hal lain yang menyebabkan pasokan pangan ke wilayah atau kelompok masyarakat tersebut terputus. Apabila kondisi telah pulih, kelompok penduduk miskin ini pada umumnya akan dapat segera membebaskan diri dari kungkungan kemiskinan.

Konsumsi beras sebagai bahan pangan utama masyarakat hingga saat ini masih tinggi. Kondisi ini akan memberikan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu program diversifikasi pangan dalam kebijakan pangan nasional perlu diintegrasikan dalam perspektif penawaran maupun permintaan.

Kebijakan diversifikasi pangan selama ini kurang efektif. Kemungkinan kurang efektifnya program diversifikasi pangan tersebut adalah ketidak-konsistenan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pangan, termasuk beras. Untuk itu, pemerintah perlu mempertegas komitmennya mengenai promosi diversifikasi pangan. Hal ini dapat diwujudkan melalui upaya menjaga konsistensi dan sinkronisasi antara kebijakan produksi dan harga beras dengan program dan kebijakan diversifikasi pangan.

Kebijakan pengendalian penduduk merupakan faktor penting dalam strategi pengurangan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Namun kebijakan tersebut harus pula dibarengi dengan kebijakan diversifikasi ekonomi untuk pengembangan pedesaan secara umum. Penciptaan lapangan kerja di pedesaan, terutama di sektor luar usahatani (*non-farm*) jelas merupakan langkah yang amat efektif dalam peningkatan pendapatan regional. Disinilah perlunya strategi kebijakan yang komprehensif di bidang kependudukan, pemulihan ekonomi yang berbasis penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan *non-farm* di tingkat pedesaan, dapat mengurangi faktor tekanan penduduk, yang dapat menurunkan tingkat degradasi lahan. Degradasi lahan jelas mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan petani, terutama mereka yang mengusahakan tanaman yang relatif sensitif terhadap kualitas lahan, seperti padi ladang dan ubi jalar. Dengan demikian, pemilihan jenis tanaman dan perencanaan pola usahatani yang lebih tepat sesuai dengan kapasitas sumber daya menjadi alternatif yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Namun demikian, strategi yang dikemukakan di atas akan dapat berjalan dengan lebih baik jika konsep pembangunan nasional dapat diubah secara fundamental. Pembangunan nasional semestinya tidak dirancang untuk memposisikan pembangunan pertanian sebagai pendukung proses industrialisasi. Pengalaman akhir-akhir menunjukkan bahwa implementasi konsep ala Lewis ini justru, akhirnya, membawa kehancuran pada perekonomian nasional. Pengalaman ini juga sekaligus telah menyadarkan kita agar mengadopsi konsep pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan pertanian sebagai motor pembangunan nasional secara keseluruhan.

Ketahanan pangan memang terkait erat dengan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan yang semakin baik yang disertai dengan pemanfaatan keragaman potensi sumberdaya antar daerah. Dengan memanfaatkan keragaman potensi sumber daya antar daerah dan keragaman selera serta permintaan pangan yang semakin mengglobal, pemantapan ketahanan pangan antara lain diwujudkan melalui upaya: (a) memanfaatkan potensi dan keragaman sumberdaya lokal yang dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan, (b) mendorong pengembangan sistem dan usaha agribisnis pangan yang berdaya saing, berkelanjutan, berkeadilan dan terdesentralisasi, (c) mengembangkan perdagangan pangan regional (antar daerah) yang mampu meningkatkan ketersediaan dan kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat dalam kerangka NKRI, bukan dalam semangat otonomi daerah dalam arti sempit, (d) memanfaatkan pasar internasional pangan secara bijaksana bagi pemenuhan kebutuhan konsumen yang beragam seiring dengan pengembangan

ekonomi pangan di dalam negeri, dan (e) memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin atas pangan yang bersifat pokok.

Pembangunan pertanian perlu diarahkan untuk membawa kemakmuran bagi para pelakunya di daerah pedesaan. Karena kondisi lingkungan (*environment*) yang baik adalah vital untuk kegiatan produksi pertanian, maka kemakmuran yang dihasilkan dari kegiatan pertanian akan mendorong masyarakat petani untuk mengkonservasi lingkungan. Untuk mencapai kondisi ini, maka pembangunan pertanian harus bertumpu pada paradigma yang berorientasi pada pemberian rangsangan dan kebebasan pada masyarakat petani untuk meningkatkan kemampuan '*creativity- entrepreneurship*' sehingga mereka mampu bersaing dalam globalisasi ekonomi dan mandiri secara ekonomi. Untuk itu, organisasi-organisasi petani perlu diubah secara fundamental, dari organisasi-organisasi yang berfungsi sebagai instrumen bagi kekuasaan politik nasional menjadi organisasi-organisasi yang mampu melayani kebutuhan petani untuk selalu meningkatkan kemampuan '*creativity- entrepreneurship*' .

Pusat Studi Pembangunan, LP-IPB
Badan BIMAS Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI

PENGANTAR LOKAKARYA

Dr. Bayu Krisnamurthi, MS
Kepala Pusat Studi Pembangunan IPB

Yth. Bapak Menteri Pertanian RI
Yth. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan
Yth. Bpk. Walikota Bogor
Yth. Bapak & Ibu sekalian

Assalamualaikum Warohmatullahu Wabarokatuh

Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena kita bisa bertemu dalam pertemuan hari ini. Pertama kami dari PSP IPB menghaturkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada Bapak Menteri Pertanian serta Bapak & Ibu undangan yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk menghadiri acara sederhana ini.

Acara lokakarya ini sebenarnya lahir dari pertanyaan kecil yang diajukan oleh Bapak Bungaran Saragih kepada kami beberapa waktu yang lalu saat kita semua prihatin dengan bencana banjir yang melanda beberapa tempat di Indonesia. Beliau menanyakan apakah bencana ini akan berulang? Saya menjadi murid Prof. Bungaran selama 15 tahun dan saya tahu jika beliau bertanya seperti itu ada pemikiran besar dibalik pertanyaan itu.

Untuk menjawab pertanyaan kecil Prof. Bungaran itu, kami mencoba mengumpulkan rekan-rekan, dan mengkaji pertanyaan sederhana tadi. Di dalam diskusi, jawaban yang muncul atas pertanyaan mengapa banjir terjadi di Jakarta? Jawaban canda adalah karena banjir kiriman dari Bogor. Namun jawaban canda tersebut dijawab dengan canda juga bahwa banjir yang berasal dari Bogor diakibatkan oleh rusaknya kawasan Puncak yang dipergunakan secara *over utilized* oleh warga Jakarta sendiri. Mengapa warga Jakarta melakukan hal itu?, sampai akhirnya di ujung pertanyaan itu ada masalah yang berkaitan dengan penambahan penduduk.. Pertumbuhan penduduk kita yang hanya 1,5 % itu sudah 3 juta jiwa/tahun. Perhitungan secara kasar, 3 juta jiwa itu membutuhkan tambahan pangan yang dihasilkan oleh lahan kurang lebih 100.000 Ha/thn. Belum lagi mengenai tambahan tenaga kerja. Jadi dengan terjadinya penambahan penduduk telah mengakibatkan tekanan sumberdaya alam, terjadinya penurunan SDA dan pada akhirnya kita semua merasakan dampak adanya tekanan SDA tadi. Nampaknya jawaban atas pertanyaan Prof. Bungaran Saragih tadi sudah terjawab bahwa sangat mungkin terjadi apabila kita tidak melakukan sesuatu yang mendasar.

Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan ini terselenggara berkat dukungan dari Badan Bimas Ketahanan Pangan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Achmad Suryana atas support yang diberikan dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada penyampai makalah, rekan-rekan dari PT, LSM yang pada hari ini, mudah-mudahan sampai dengan sore nanti kita berkumpul. Dengan jumlah hadirin yang tidak begitu banyak, hanya sekitar 50 orang, kita

mencoba untuk menjadikan *workshop* ini sebagai langkah awal dari serangkaian kegiatan untuk membahas masalah yang sangat mendasar ini. Direncanakan kira-kira pada bulan September nanti, PSP akan mengadakan lokakarya setelah kami selesaikan studi mengenai keseimbangan pangan di Indonesia tahun 2005. Jadi ini adalah tahap pertama, mudah-mudahan juga bergulir di Perguruan Tinggi lainnya.

Bapak Menteri Pertanian dan hadirin yang saya hormati,

Saya memohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan lokakarya kali ini. Pemilihan ruang yang mungkin agak dipaksakan dan terlihat berdesakan. Terus terang kami agak sedikit memaksa untuk dilaksanakan di ruangan ini. Ada alasan romantisme historis karena pada tanggal 27 April 1952 gedung ini didirikan dengan peletakan batu pertama dan pidato oleh Presiden Soekarno. Jadi pada saat ini sudah berulang tahun yang ke-50. Pada pidatonya, beliau menyampaikan sesuatu yang persis sama dengan pertanyaan yang kita ajukan tadi, " Siapa yang akan memberi makan bangsa Indonesia ini ? Pada waktu itu beliau baru memproyeksikan jumlah penduduk kita sekitar 110 – 120 juta (tahun 1952), dan saat ini jumlah itu telah mencapai 2 kali lipatnya.

Kami juga mencatat bahwa di depan gedung ini pada tahun 1972 adalah kunjungan Presiden Soeharto pertama ke IPB (30 tahun yang lalu). Beliau juga mengatakan hal yang sama, dimana pada saat itu bergulir suatu program yang sekarang dikenal dengan nama program BIMAS, dan menjadi sangat massal meskipun persiapannya sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi di

Pusat Studi Pembangunan, LP-IPB
Badan BIMAS Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI

tahun 2002 ini kita mencoba mendiskusikan hal yang serupa, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa dalam 50 tahun ini, tetapi mungkin karena konteksnya berbeda. Dan mudah-mudahan aspek historis tadi bisa memberikan inspirasi sekaligus semangat bagi kita untuk memikirkan masalah yang sangat mendasar ini.

Demikian, selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Menteri Pertanian untuk memberikan amanat sebagai pengantar sekaligus membuka lokakarya ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pusat Studi Pembangunan, LP-IPB
Badan BIMAS Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, MEd.

Yth. Sdr. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan

Yth. Para Eselon I Lingkup Departemen Pertanian

Yth. Sdr. Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan

Yth. Sdr. Kepala Pusat Studi Pembangunan

Yth. Saudara-saudara sekalian

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Untuk memulai pertemuan yang penting ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur serta memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua selalu mendapat petunjuk dan restu-Nya, serta diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagai mana kita ketahui bersama, ketersediaan pangan pada tingkat nasional yang diukur dari ketersediaan energi (kalori) dan protein, selalu lebih tinggi dari kecukupan yang direkomendasikan, yaitu energi sebesar 2.550 kilo kalori per kapita per hari dan protein 55 gram per kapita per hari. Selama kurun waktu 1996 – 2000, ketersediaan pangan juga masih cukup, namun dengan kecenderungan menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan penduduk yang relatif besar, yang tidak sejalan dengan peningkatan produksi pangan yang berjalan lebih lambat.

Kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang ditunjukkan oleh angka konsumsi per kapita per hari masih dibawah angka kecukupan yang direkomendasikan, yaitu energi 2.200 kilo kalori per kapita per hari dan protein 55 gram per kapita per hari. Disamping belum mencapai kecukupan, angka konsumsi per kapita tersebut cenderung menunjukkan penurunan selama kurun waktu 1996 – 2000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat banyaknya tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatannya, sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Kedua hal tersebut diatas menunjukkan bahwa ketahanan/ketersediaan pangan pada tataran nasional/agregat tidak selalu menjamin ketahanan pangan pada tingkat mikro/rumah tangga. Pada sisi lain, ketahanan pangan setiap rumah tangga memiliki perspektif yang sangat strategis, karena dari ketahanan pangan pada tingkatan rumah tangga inilah yang akan dihasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu 205,8 juta jiwa pada tahun 2000, dan terus bertambah 1,49 persen per tahun, pemenuhan ketahanan pangan merupakan tantangan besar, yang dihadapi secara sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan. Hal tersebut secara langsung berkaitan pada dua hal mendasar: (a) peningkatan kebutuhan pangan dan (b) peningkatan kebutuhan kesempatan kerja guna memperoleh tingkat pendapatan yang layak. Kedua hal tersebut merupakan dua komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan.

Saudara-saudara sekalian,

Tuntutan kebutuhan pangan, tuntutan kebutuhan aktivitas ekonomi yang mampu memberikan kesempatan kerja, dan tingkat perubahan struktural ekonomi yang relatif lambat, telah menjadi sumber utama tekanan pada sumberdaya alam tersebut juga merupakan konsekuensi dari adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan fasilitas umum, jalan, lahan untuk industri, dan sebagainya.

Gejala tekanan pada sumberdaya alam telah ditunjukkan dengan meningkatnya gangguan akibat penurunan kualitas sumber daya alam, seperti banjir besar yang baru-baru ini terjadi di beberapa daerah. Dalam hal ini bukan hanya besarnya bencana yang perlu dicermati, tetapi juga peningkatan frekuensi dari dampak bencana yang meningkat. Penanganan bencana alam yang terjadi untuk meringankan beban para korban banjir, tetapi juga merupakan solusi jangka panjang untuk mencegah berulangnya bencana dengan dampak semakin bertambah besar.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Tekanan kepada sumber daya alam tanpa diikuti perubahan struktur ekonomi yang memadai, akan menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan, baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, degradasi lahan akan menyebabkan keterbatasan kemampuan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, sehingga petani tidak mampu memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara maksimal. Hal ini selanjutnya akan mengakibatkan semakin rendahnya

produktivitas usaha tani dan semakin besarnya jumlah penduduk miskin. Sebagaimana diketahui, penduduk miskin di pedesaan, disamping ditengarai karena sempitnya penguasaan lahan, juga terkonsentrasi pada daerah-daerah lahan yang marginal.

Pada sisi lain, tingkat dan kedalaman kemiskinan tersebut juga akan menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Hubungan sirkuler ini harus segera diputus agar ketahanan pangan dapat diwujudkan secara lestari.

Pemantapan ketahanan pangan juga memiliki arti strategis dalam kedua konteks tersebut, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pemanfaatan ketahanan pangan harus dapat mencapai kedua tujuan tersebut secara simultan, yang secara rinci dapat diuraikan menjadi :

1. Meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, baik dari laba usahatani maupun dari sumber-sumber lainnya
2. Menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga dalam jumlah yang cukup, terjangkau, aman dikonsumsi dan berkelanjutan
3. Meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pengembangan agribisnis pangan dalam kerangka dinamisasi perekonomian desa

Formasi tersebut telah dituangkan dengan baik dalam GBHN 1999-2004, yaitu " pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan, pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan pendapat petani" .

Dari amanat GBHN tersebut jelas tergambar bahwa sistem ketahanan pangan harus dimulai pada tingkat lokal dengan memanfaatkan atau mengusahakan variasi bahan pangan yang ada ditingkat lokal. Dengan kata lain tidak perlu terjadi penyeragaman pola produksi dan konsumsi pangan secara nasional. Selain itu dari amanat tersebut juga mengandung implikasi bahwa perencanaan pangan harus dibangun pada satuan rumah tangga, dimana ketahanan pangan nasional hanya akan mantap apabila kondisi ketahanan pangan masing-masing rumah tangga atau keluarga juga mantap. Hal lain yang juga perlu menjadi catatan dari amanat GBHN tersebut adalah perlunya efisiensi produksi dalam menghasilkan bahan pangan lokal agar memiliki daya saing dan harganya terjangkau oleh para konsumen tetapi tetap menguntungkan bagi produsen atau petani.

Saudara-saudara sekalian,

Upaya-upaya pemantapan ketahanan pangan dengan berbagai ciri-ciri tersebut merupakan tantangan besar. Pertama, karena penduduk akan terus bertambah. Kedua, dampak krisis ekonomi yang masih terus dirasakan saat ini menyebabkan jumlah penduduk miskin yang ada masih cukup besar, sehingga memerlukan proses *recovery* yang cepat. Ketiga, sumberdaya alam semakin terbatas, sehingga

pengelolaannya memerlukan perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan seluruh kepentingan yang ada. Untuk menjawab tantangan besar tersebut, yaitu peningkatan jumlah penduduk, dikaitkan dengan penurunan kualitas sumberdaya alam serta pengaruhnya pada ketahanan pangan, saya menilai lokakarya yang kita ikuti bersama-sama hari ini sangat strategis, karena akan menentukan masa depan bangsa dan negara.

Besar harapan saya, melalui lokakarya ketahanan pangan yang bertopik: Tekanan penduduk, degradasi lingkungan, dan ketahanan pangan, kita dapat menyatukan pemahaman tentang permasalahan yang kita hadapi dan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang jernih, komprehensif dan bersifat multi dimensi ini, bukan lagi perdebatan akademis dan teoritis.

Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan Lokakarya " Tekanan Penduduk, Degradasi lingkungan, dan Ketahanan Pangan" dibuka dengan resmi.

Selamat berdiskusi dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu bersama kita.

Menteri Pertanian,

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, MEd

DAFTAR PESERTA LOKAKARYA

No.	Nama	Instansi
1.	Bungaran Saragih	Departemen Pertanian
2.	Djodi Tjahjadi	Badan Bimas Ketahanan Pangan
3.	Hermanto	Badan Bimas Ketahanan Pangan
4.	Achmad Suryana	Badan Bimas Ketahanan Pangan
5.	Tjuk'Eko Hari Basuki	Badan Bimas Ketahanan Pangan
6.	Sri Wulan	Badan Bimas Ketahanan Pangan
7.	Ngenten Sinulingga	Badan Bimas Ketahanan Pangan
8.	Ning Pribadi	Badan Bimas Ketahanan Pangan
9.	Rahardi	Badan Bimas Ketahanan Pangan
10.	Pantjar Simatupang	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
11.	Erna Maria Lokolo	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
12.	Benny Rachman	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
13.	Frans Dabukke	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
14.	Mewa Ariani	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
15.	Budhi Gunawan	PPLH Universitas Padjajaran
16.	Abdul Munif	PKPHT-IPB
17.	Damayanti B.	PKPHT-IPB
18.	Santun R.P. Sitorus	Jurusan Tanah IPB
19.	Wani Hadi Utomo	PPLH Universitas Brawijaya
20.	H.T. Soelistyani	PPLH Universitas Brawijaya

Pusat Studi Pembangunan, LP-IPB
Badan BIMAS Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI

No.	Nama	Instansi
21.	Harianto	Pusat Studi Pembangunan-IPB
22.	Y. Bayu Krisnamurthi	Pusat Studi Pembangunan-IPB
23.	Rizal Syarif	LPM-IPB
24.	Bunakor Sanim	FEM-IPB
25.	Endriatmo Soetarto	PKA-IPB
26.	Ari Saptari	PPLH-ITB
27.	Bobby Setiawan	PPLH-UGM
28.	Yayuk F.B.	GMSK-IPB
29.	Parulian Hutagaol	PPLH-IPB
30.	Suryo Adiwibowo	PPLH-IPB
31.	Baginda Siagian	PSP-IPB
32.	Nino	IPB
33.	Adrian Lubis	Pasca Sarjana-IPB
34.	H.R. Iswara Natanegara	Walikota Bogor
35.	Indra M. Roesli	KPLH- Kota Bogor
36.	Juju S.	Dinas Pertanian-Kota Bogor
37.	Megawati S.	Pemda Cianjur
38.	Tateng S.	Pemda Kabupaten Bogor
39.	Odi Suryadi	Pemda Kabupaten Bogor
40.	A. Kuswara	Pemda Kabupaten Bogor
41.	Rosadi S.	Pemda Kabupaten Bogor
42.	Hermanto Siregar	UNSFIR

No.	Nama	Instansi
43.	Soewartono	ADB
44.	Nesim Tumkaya	UNFPA
45.	Deddy Masykur Riyadi	Bappenas
46.	Joyo Winoto	Bappenas
47.	Hemy Dawaty	Bappenas
48.	Bustanul Arifin	INDEF
49.	Usman Hasan	HKTI
50.	Andy A. Zaelany	Kependudukan-LIPI
51.	Ratnasari Azahari	BKKBN
52.	Utami	JKPP
53.	Andi Rahmah	Pelangi
54.	Muchlis	RRI
55.	Budiman	Suara Pembaharuan
56.	Tanjung	Radar Bogor
57.	Akbar	Republika
58.	Mawardi	Pakuan
59.	Endot	Bisnis Indonesia
60.	Edwin	RCTI
61.	Uyun	Pikiran Rakyat
62.	Imam	Republika
63.	Rendi A. Witular	The Jakarta Post

LIPUTAN MEDIA MASSA

1. **Republika, 2 Mei 2002**



Konsumsi Pangan Mikro Masyarakat Indonesia Rendah

JAKARTA — Seharusnya, jumlah konsumsi pangan rumah tangga yang dianjurkan untuk sumber energi sebesar 2.550 kilo kalori. Sedang protein sebesar 55 gram per kapita per hari. Namun, kata Menteri Pertanian, Prof Bungaran Saragih, yang sekarang terjadi adalah tingkat konsumsi energi baru 2.200 kilo kalori dan konsumsi protein 50 gram per kapita per hari.

Ini artinya, kata Bungaran dalam arahannya pada *Lokakarya Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan, dan Ketahanan Pangan*, di Bogor, Rabu (1/5), tingkat konsumsi pangan mikro di Indonesia masih rendah. "Saat ini kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan masih di bawah angka kecukupan," katanya.

Penyebabnya, pertumbuhan penduduk yang semakin besar. Sehingga peningkatan produksi pangan yang terjadi tidak sejalan dengan pertambahan penduduk. Menurut Dr Nesim Tumkaya, perwakilan UNFPA untuk Indonesia, laju pertumbuhan penduduk dunia saat ini mencapai 6,1 miliar. Sementara tahun 1985 sampai 1995, laju produksi pangan dunia tertinggal 64 persen dari laju pertumbuhan penduduk. Dan, ini banyak terjadi di negara-negara berkembang.

■ c10

2. Pikiran Rakyat, 2 Mei 2002



Hampir Tiga Juta Tenaga Kerja Jadi Penganggur

Tekanan Penduduk Bisa Jadi Bom Waktu

BOGOR, (PR).-

Tekanan Penduduk (*pressure population*) yang saat ini hampir dilupakan karena banyaknya bermunculan masalah jangka pendek, termasuk masalah politik dan keamanan, merupakan bahaya jangka panjang dan merupakan bom waktu yang harus diantisipasi.

Demikian dikatakan Menteri Pertanian Bungaran Saragih ketika berbicara dalam Lokakarya Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Pusat Studi Pembangunan (PSP) IPB, Rabu kemarin di Bogor. Bungaran menegaskan bahwa tekanan penduduk ini dampak jangka panjangnya akan lebih mengagetkan. Prediksi tersebut menurut Bungaran Saragih, karena saat ini hampir tidak ada lagi lembaga yang dengan serius menangani lonjakan penduduk. "Tidak ada lagi suara BKKBN maupun lembaga lain yang gencar mengendalikan pertumbuhan penduduk," tegas

Bungaran sambil menyebut bahwa ia pernah mengungkapkan masalah ini beberapa kali di kabinet. Oleh karena itu harus ada orang yang berfikir jernih untuk memecahkan jangka panjang.

"Tidak ada lagi orang membicarakan kondisi Kawasan Puncak. Kita terlalu mudah melupakan masalah yang sebenarnya harus diantisipasi. Di Jakarta saja sekarang pembicaraan sudah mengarah pada siapa pengganti gubernur, bukan masalah yang lebih penting," iuturnya.

Namun, diingatkan bahwa berbagai diskusi dan lokakarya semacam itu sudah seringkali dilakukan dimana-mana. Namun satu hal yang sering terlupakan bahwa pembahasannya dalam posisi terkotak-kotak. Karena itu, ia berharap agar berbagai pakar mampu mengkaitkan satu permasalahan dengan permasalahan lainnya untuk dicarikan solusinya secara terpadu.

Sebagai gambaran, Mentan menyebut bahwa saat ini hampir 3 juta

tenaga kerja per tahun menjadi pengangguran yang tentu mencari lapangan kerja yang memang sudah sangat terbatas. "Jika sebagian besar tenaga kerja pengangguran tersebut dengan terpaksa masuk ke sektor pertanian, terutama *on-farm*, maka akan semakin *gurem* sajalah pertanian kita," tuturnya

Menteri Pertanian juga mengajak praktisi, birokrat maupun pakar serta LSM untuk menghilangkan retorika-retorika pembangunan yang hanya bersifat membuai. "Pahit katakan pahit, manis katakan manis demi bangsa di masa mendatang," tegasnya.

Dalam Lokakarya yang pesertanya terdiri dari berbagai pakar lingkungan, baik dari IPB, UGM, ITB dan Unpad serta berbagai dinas instansi lainnya, menampilkan tiga pembicara yaitu, Direktur INDEF Dr Bustanul Arifin, Dr. Nesim Tumkasa (UNFPA representative Indonesia) dan Dr. Achmad Suryana (Bimas Deptan). (D-3)***

PAJAJARAN—Persoalan baru yang dihadapi penduduk yang tidak terkendali sama juga dengan pada para peserta lokakarya, perhatian gambaran jelas ke-
 membantuan gambaran jelas ke-
 Walaupun demikian, pertum-
 buhan penduduk dan perma-
 di-perhitungannya secara cermat.
 Jika tidak, bakal terjadi ledakan
 Semantara itu, mentan yang
 membuka lokakarya tersebut
 mengagalkan herketanaan dengan
 kekurangan pangan. "Makanya,
 soal laporan perkembangan pa-
 ngan nasional itu mesiti bagai-
 mana adanya, bukan bagaimana
 duk, degradasi lingkungan, dan
 ketahanan pangan sekaligus.
 Selama ini, tiga problem tersebut
 dibahas secara terpisah. Padahal,
 untuk bisa mendapatkan hasil
 yang optimal, ketiganya mesiti
 diselsaikan secara terpadu.
 "Tiga juta bayi lahir setiap tahun
 di Indonesia. Di saat yang sama,
 kita dihadapkan pada perma-
 hahan ketersediaan bahan sam-
 pada lahan-lahan marginal yang
 yang cenderung menurun, metro-
 sonya daya beli, dan penyem-
 pada masa selanjutnya, perma-
 salahan ini bakal semakin kronis-
 Ditinjau waritawar usai mem-
 buka lokakarya, Mentan Bung-
 Arief dari Institut for Develop-
 ment of Economic and Financ-
 (INDEF), Dr Ir Achmad Suryana
 perkebangan terakhir keter-
 kecondongan menurun, keter-
 ngan Departemen Pertanian Pa-
 tampil di sesi pertama. Selain
 meraka, ahli lingkungan asal
 Turki Dr Nesim Turkaya juga

Bungaran: Awas! Ketersediaan Pangan Jadi Bom Waktu

3. Radar Bogor, 2 Mei 2002

Pusat Studi Pembangunan, LP-IPB
 Badan BIMAS Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI

SK Pakuan, 7-8 Mei 2002

Bungaran Saragih Akibat Krisis Daya Beli

Protein Rakyat Terus Turun

Bogor, Pakuan.-

Menteri Pertanian Prof Dr Ir Bungaran Saragih, M.Ec mengatakan, kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang ditunjukkan oleh angka konsumsi per kapita per hari masih dibawah angka kecukupan yakni 2.200 kilo kalori (energi) per hari per kapita dan protein 50 gram/hari selama kurun waktu 1996-2000.

Penurunan ini disebabkan menurunnya daya beli masyarakat akibat banyaknya tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang kehilangan pekerjaan sumber pendapatannya sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan.

"Gambaran diatas menunjukkan bahwa ketahanan/ketersediaan pangan pada tataran nasional (agregat) tidak selalu menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga (mikro). Padahal ketahanan pangan setiap rumah tangga ini memiliki perspektif yang sangat strategis, karena dari ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tsb akan dihasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas," demikian dikemukakan Menteri Pertanian Prof Dr Ir Bungaran Saragih, M.Ec baru-baru ini saat membuka lokakarya: Tekanan Pertumbuhan Penduduk, Degradasi Lingkungan, dan Ketahanan Pangan di Ex Gedung Faperta Lt.2 Kampus Baraniangsiang Bogor.

Lokakarya tersebut menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Dr Nesim Tumkaya (United Nation Population Fund), Dr Ir Achmad Suryana (Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Deptan), Ir Suryo Adiwibowo, Ms (Kepala PPLH-IPB), Dr Bustanul Arifin, Dr Ir Y Bayu Krisnamurthi, MS Kepala PSP Bogor dan beberapa pembicara lainnya.

Masih kata Bungaran, ketahanan pangan pada tataran nasional tidak selalu menjamin ketahanan



pangan pada tingkat rumah tangga. Pada sisi lain, ketahanan pangan setiap rumah tangga memiliki perspektif yang sangat strategis karena dari ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga inilah akan dihasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

"Oleh sebab itu pemenuhan ketahanan pangan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Hal tsb secara langsung berakibat pada dua hal mendasar yakni peningkatan kebutuhan pangan dan peningkatan kesempatan kerja guna memperoleh tingkat pendapatan yang layak," kata Bungaran seraya menambahkan bahwa dua hal itu merulakan dua komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan.

Menyoroti kecukupan pangan, Achmad Suryana senada dengan Bungaran Saragih, walaupun secara makro ketersediaan pangan telah memenuhi standar kecukupan, namun kecukupan tingkat nasional tidak tercermin dalam tingkat konsumsi pangan perkapita atau secara mikro. Tingkat perkapita pada tahun 1999 sekitar 1.849 kolikalori/hari atau hanya 82,2 persen dari tingkat kecukupan standar kecukupan. Begitu pun komposisi gizi masih belum seimbang dan didominasi oleh bahan pangan nabati.

"Belum tercapainya kecukupan pangan tingkat individu ini juga ditunjukkan oleh tingginya balita yang mengalami gizi kurang (24,9%) dan gizi buruk (7,7%). Disamping itu, pada tahun 199 tercatat sekitar 24,2 % wanita usia subur mengalami kekurangan energi kronis," kata Suryana. Apabila kelompok ini sedang mengalami kehamilan atau menyusui, maka dapat diperkirakan anak-anak yang dilahirkannya akan mengalami masalah pertumbuhan dan kesehatan. ■ 0-31